



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI PARIWISATA RI
(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 14
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Senin, 17 November 2025
Pukul	: 10.30 – 13.25 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,M.A. (Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Pembahasan Program Unggulan Kementerian Pariwisata dalam Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Sektor Pariwisata.
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 18 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Menteri Pariwisata dan Jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 17 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,M.A. (Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PAN).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pariwisata mengenai Program Unggulan Kementerian Pariwisata dalam Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Sektor Pariwisata, termasuk capaian tahun 2025 dan target tahun 2026.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata untuk:
 - a. Merumuskan program kerja yang menunjukkan keberpihakan pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif di sektor pariwisata.
 - b. Memperkuat kerja sama antara Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan dan merata di seluruh wilayah.
 - c. Memaksimalkan potensi wisata berbasis komoditas lokal, termasuk kopi dan sumber daya alam lainnya, sebagai daya tarik yang memperkuat nilai ekonomi pariwisata nasional.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pembangunan serta pembenahan infrastruktur dan interkoneksi menuju destinasi pariwisata yang masih belum memadai guna memastikan seluruh destinasi dapat dijangkau secara optimal serta mendukung percepatan pengembangan pariwisata nasional.
 - b. Memastikan terwujudnya *link and match* antara lulusan Politeknik Pariwisata di seluruh Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di destinasi pariwisata sehingga kompetensi lulusan dapat terserap secara optimal.
 - c. Penguatan ekosistem pariwisata berbasis digitalisasi (Tourism 5.0), promosi destinasi unggulan, dan integrasi dengan desa wisata sesuai klasifikasi nasional untuk mendukung pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
 - d. Membangun dashboard pariwisata yang dapat menyediakan data-data terkait kepariwisataan secara *real-time* sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.
 - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait berkenaan dengan perijinan dan produksi film nasional.

4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rapat Kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB.

MENTERI PARIWISATA RI,

TTD

WIDIYANTI PUTRI WARDHANA

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

**Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,
M.Hum.,M.A.**